

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF
OTONOMI DAERAH**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

INDAH RAHMAWATI

NIM:111011035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

TAHUN 2016

PENGESAHAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Diterima dan diuji oleh tim penguji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Maret 2016

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Menik Chumaidah, SH., M.Hum
M.Hum

Ketua

H. Sulistio Adiwinarto, S.H.,

Sekretaris

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan

H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.Hum
NIP : 196712141993031003

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan pada Allah yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul:

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Skripsi ini saya susun guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Saya sangat menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan. Maka dari itu saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang setinggi –tingginya kepada :

1. Bapak H. Sulistio Adiwirto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas waktu yang diberikan juga nasehat-nasehat beliau yang sangat berguna bagi saya.
2. Bapak Djoko Purwanto, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran yang tiada terhingga dalam membimbing penyusunan skripsi saya ini.
3. Ibu Fauziah, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang juga memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran yang tiada terhingga dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum. Selaku dosen wali saya, terima kasih atas waktu dan nasehatnya yang telah diberikan kepada saya

5. Kepada seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember saya ucapkan terima kasih atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu dikampus tercinta.
6. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Demikian pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | 1 |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | 2 |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | 3 |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | 4 |
| HALAMAN MOTTO..... | 5 |
| KATA PENGANTAR..... | 6 |
| DAFTAR ISI..... | 8 |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 11 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 12 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 15 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 16 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 16 |
| 1.5 Metodologi Penelitian..... | 16 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 19 |
| 2.1 Pengertian Kewenangan..... | 19 |
| 2.2 Sumber Kewenangan..... | 20 |
| 2.3 Pengertian Pemerintahan Daerah..... | 22 |
| 2.3.1 Fungsi Pemerintahan Daerah..... | 23 |
| 2.3.2 Asas Pemerintahan Daerah..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 2.4 Otonomi Daerah..... | 24 |
| 2.4.1 Maksud dan Tujuan Pemerintahan Daerah..... | 26 |
| 2.4.2 Prinsip Otonomi Daerah..... | 27 |
| 2.4.3 Asas Otonomi Daerah..... | 27 |
| 2.5 Perjanjian dan Kerjasama Internasional..... | 29 |
| 2.5.1 Pengertian Perjanjian Internasional..... | 29 |
| 2.5.2 Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Para Ahli..... | 29 |
| 2.5.3 Berdasarkan Fungsinya..... | 30 |
| 2.5.4 Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional..... | 30 |
| 2.5.5 Jenis-Jenis Perjanjian Internasional..... | 32 |
| 2.5.6 Kerjasama Internasional..... | 32 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 35 |
| 3.1 Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Perjanjian dan Kerjasama Internasional..... | 35 |
| BAB IV PENUTUP..... | 58 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 58 |
| 4.2 Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku:

- Ganjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta,
- Indroharto, 1989, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta
- Jawahir Thontowi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jawahir@fh.uui.ac.id, Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009: 149-150
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Surabaya
- Philipus M. Hadjon, 1997, "tentang Wewenang", YURIDIKA, No.5 & 6 Tahun XII, September – Desember,
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta
- S.F. Marbun, 1997, Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Soemanto, M.A., 2007, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah : Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial
- Takdir ali mukti, 2014, Tinjauan yuridis dan teoritis terhadap kerjasama internasional daerah otonom, Jurnal hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:Yogyakarta,

Peraturan PerUndang- Undangan

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang –Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
4. Undang- Undang RI No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang panduan umum tata cara hubungan. dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.

Media Internet

<http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html>

<http://softilmu.blogspot.co.id/2014/08/pengertian-perjanjian-internasional.html>

<http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.co.id/2014/09/hubungan-kerjasama-dengan-negara-lain.html>

<http://setkab.go.id/laporan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-rencana-perumusan-dan-implementasi-perjanjian-internasional-oleh-pemerintah-daerah/>